

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Nagari Sungai
Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Oleh : Marzuki

Asdi Agustar dan Alfitri

The purpose of the research is to analyze the BKM exertions as a social institute that form from, by and for society at PNPM Mandiri Perkotaan to run society participant, then evaluate the society participant at Sungai Beringin Village in Lima Puluh Kota District. This research has done by descriptive survey method, by doing descriptive analysis. Choosing the research location has done by directly that is in Sungai Beringin Village according BPS data at Lima Puluh Kota District in 2008. the population is 2.585 or 692 families with poor societies 250 families or 756 person or around 38,94% of the population. The data collecting had done by in-depth interview method with the committee and members of BKM.

The result of the research is gotten as effort that has done to participate the societies, to become the member of BKM, the people should be understood about activity of PNPM Mandiri Perkotaan by socialization and increase the communication and information toward the societies. Then the activity that has done by BKM to make the societies activity in every PNPM Mandiri Perkotaan activities, like to function the Pemuka Adat and Ninik Mamak, to function and increase the participate of Bundo Kanduang, to give some advice for the youth and to optimalize the work of BKM community. But the effort that has done by BKM to make the society to feel, have every activity which is build by PNPM Mandiri Perkotaan was not concrete. The participate of Sungai Beringin Village society has been enough in doing PNPM Mandiri Perkotaan, although the participate still in developing program implementation. Based on the research the Sungai Beringin Village has been involved in every activity. The problems and obstruction to motivate the societies participate which is from the out side of the BKM that are some weakness of the that society itself especially Human Resources like less educated, less creativity and also busy with their routines activities for their living. Whereas the problems from the BKM itself that is coordination between each of BKM member.

In order to increase fully participate of society, need to research for every element and characteristic problems which is occurred in the field. This is to get some concrete view of every problems either personality, or physical components are linked together which could influence the success of development programe.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar terhadap struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional disamping percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya "*gross national product*" (GNP) ternyata tidak menjamin meratanya distribusi pendapatan nasional dan "*trickle down effect*", bahkan lebih banyak merugikan masyarakat lapis bawah (Supriatna, 1997), sehingga memberi peluang munculnya berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, urbanisasi dan kerusakan lingkungan (Seers dalam Supriatna, 1997)

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari satu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik. Namun apabila pembangunan dilaksanakan secara "*top down*" dapat mengakibatkan munculnya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan dampak yang buruk terhadap proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tidak berkembangnya proses pemberdayaan dan tidak terlaksananya partisipasi yang efektif di masyarakat. Untuk mewujudkan partisipasi dalam proses pembangunan itu tidaklah berjalan secara otomatis, akan tetapi diperlukan beberapa pendekatan dan strategi dalam pembangunan guna mendukung upaya tersebut di atas. Menurut Craig dan Mayo (Hikmat, 2004), pemberdayaan masyarakat akan tercapai apabila partisipasi masyarakat sudah berjalan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan merupakan Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan pengembangan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan P2KP adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan partisipasi masyarakat. PNPM mandiri Perkotaan mempunyai visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir untuk memobilisasi sumber daya

dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya dari luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.

PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaat PNPM Mandiri Perkotaan, memutuskan sendiri kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan juga merupakan wahana pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan aparat pemerintah melalui pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun keberlanjutan manfaat kegiatan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2008).

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perkotaan *Pertama*, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. *Kedua*, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. *Ketiga*, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dipilih dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. BKM dimaksudkan untuk mewadahi potensi partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan di pedesaan. Pengelolaan pembangunan pedesaan dimaksud adalah segala urusan yang terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan produk pembangunan di tingkat desa. BKM memiliki legitimasi yang cukup kuat karena anggota-anggota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan pemilihan mulai dari tingkat RT. Kriteria calon anggota BKM pun dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk menemukan sosok-sosok 'orang baik' yang akan mengendalikan BKM di desanya. Selain itu, proses pengambilan keputusan tertinggi dalam BKM adalah musyawarah warga di tingkat desa.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai respon masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Implementasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah memberikan pengakuan kepada nagari sebagai lembaga yang otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penduduk di Nagari Sungai Beringin menurut data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008, berjumlah 2.585 jiwa atau 642 KK dengan penduduk miskin berjumlah 250 KK atau 756 jiwa atau sekitar 38,94 % dari jumlah penduduk. Cukup tingginya angka kemiskinan di Nagari Sungai Beringin disebabkan kurang lebih 83 % dari jumlah penduduk berprofesi sebagai petani baik sebagai pemilik, penggarap maupun buruh tani. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pusat pemerintahan, namun termasuk salah satu nagari miskin dengan keadaan sosial ekonomi masih relatif rendah, sarana dan prasarana desa yang terbatas.

Berdasarkan uraian-uraian diatas telah dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan : Studi Kasus Nagari Sungai Beringin.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ditentukan berapa banyak program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Melalui partisipasi dan peran aktif masyarakat yang tinggi, sasaran program diharapkan dapat terwujud. Sementara itu partisipasi masyarakat yang tinggi dapat terjadi apabila pelaksana atau pendamping program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya dan diterima oleh masyarakat. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, BKM berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dengan harapan dapat menjadi lembaga masyarakat yang *capable* untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Dari fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apa saja upaya BKM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ?

- b. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?.
- c. Apa saja permasalahan yang dihadapi BKM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ?.

Bertitik tolak dari fokus permasalahan yang ditetapkan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa upaya BKM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Mengidentifikasi kendala BKM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Nagari Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.